TINJAUAN YURIDIS EKSISTENSI HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Maroni

ABSTRAK

Pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang dilakukan oleh hakim merupakan lembaga baru dalam hukum acara pidana di Indonesia. Melalui pengawasan dan pengamatan diharapkan kesenjangan (gap) antara apa yang diputuskan hakim dan kenyataan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan dapat dijembatani. Hakim akan lebih didekatkan dengan jaksa dan pejabat lembaga pemasyarakatan sehingga hakim dapat mengikuti perkembangan keadaan terpidana.

Kata Kunci: Hakim, Hakim Pengawas dan Pengamat, Sistem Peradilan Pidana

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen maka dalam bidang hukum segala peraturan perundang-undangan produk pemerintah kolonial yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 harus diganti. Berkaitan dengan hal itu maka bangsa Indonesia telah mampu menciptakan suatu karya besar dalam bidang hukum yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 tanggal 31 Desember 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Sejak berlakunya KUHP telah menimbulkan perubahan fundamental baik secara konseptual maupun secara implemental terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Perubahan sistem peradilan yang dianut melalui undang-undang tersebut sudah tentu mengakibatkan adanya perubahan dalam cara berpikir, sikap dan cara bertindak para aparat pelaksana penegakan hukum. Disamping itu masyarakat dituntut agar menghormati hak dan kewajibannya sebagai warga negara, khususnya hak dan kewajibannya dalam proses peradilan pidana.

Salah satu perubahan yang ada dalam KUHP jika dibandingkan dengan *Het Herziene Inlands Reglement* (HIR) Stb. 1941 Nomor 44, yaitu diadakannya lembaga hukum hakim pengawas dan pengamat yang merupakan

lembaga baru dalam hukum acara pidana di Indonesia. Ketentuan tentang Hakim Pengawas dan Pengamat diatur dalam Bab XX Pasal 277 sampai Pasal 283 KUHP.

Ketentuan KUHP tersebut merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 33 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 juncto Pasal 36 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa:

- (1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.
- (2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan berdasarkan undang-undang.

Penjelasan Pasal 33 Ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, dinyatakan bahwa untuk mendapatkan jaminan bahwa putusan tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya, Ketua Pengadilan yang bersangkutan mengawasi pelaksanaan putusan tersebut.

Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan dan pemidanaan bersyarat oleh Ketua Pengadilan didelegasikan kepada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua yang disebut hakim pengawas dan pengamat untuk paling lama dua tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 277 Ayat (1) dan (2) juncto Pasal 280 Ayat (4) KUHP.

Berdasarkan ketentuan Pasal 277 Ayat (1) KUHAP tersebut maka dapat dibedakan antara tugas pengawasan dan tugas pengamatan yang dilakukan oleh hakim pada tahap eksekusi perkara pidana. Tugas pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya, sedangkan tugas pengamatan yaitu untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya (Pasal 280 KUHAP).

Dengan adanya ketentuan tentang pengawasan hakim terhadap pelaksanaan putusan maka kesenjangan (*gap*) yang ada antara apa yang diputuskan hakim dan kenyataan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan dan di luar lembaga pemasyarakatan jika terpidana dipekerjakan disitu dapat dijembatani. Hakim akan lebih didekatkan dengan jaksa dan pejabat lembaga pemasyarakatan. Hakim akan dapat mengikuti perkembangan keadaan terpidana sehingga aktif memberi pendapatnya dalam hal pelepasan bersyarat.¹

Adanya jalinan kerja antara lembaga penegak hukum pidana di Indonesia dalam hal ini pihak kejaksaan, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan merupakan suatu tuntutan yang harus diwujudkan sebagai konsekuensi dianutnya sistem peradilan pidana terpadu berdasarkan KUHAP, sehingga tujuan pemidanaan dalam proses peradilan pidana di Indonesia dapat tercapai.

Apabila ketentuan di atas telah dapat ditegakkan dalam arti telah berperannya lembaga hukum Hakim Pengawas dan Pengamat dimaksud, maka kecil kemungkinan akan ditemukannya kasus-kasus penelantaran penyelenggaraan administrasi perkara oleh pejabat pengadilan dan kejaksaan yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak terpidana yang berakibat tujuan dari sistem peradilan pidana tidak tercapai. Sebagai contoh dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang Nomor 723/Pid.B/ 2001/PN.TK tanggal 25 Februari 2002 juncto Perkara Nomor 15/Pid/2002/PT.TK tanggal 9 April 2002 juncto

Perkara Nomor 1131 K/Pid/2002 tanggal 28 Agustus 2002 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap lebih dari dua tahun, tetapi belum juga dieksekusi oleh pihak Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Putusan pengadilan tersebut luput dari pengawasan dan pengamatan dari Hakim Pengawas dan Pengamat. Setelah lama diperjuangkan oleh penasehat hukum terpidana, baru perkara tersebut dapat dilakukan eksekusi pada tanggal 23 September 2004. Dengan adanya keterlambatan pelaksanaan eksekusi terhadap perkara tersebut, telah menimbulkan kerugian di pihak terpidana yang dikenakan penahanan. Hal ini mengingat selama menunggu pelaksanaan eksekusi, terhadap terpidana yang bersangkutan tidak dapat menerima hak-haknya sebagai narapidana seperti mendapatkan remisi dan lain sebagainya dikarenakan statusnya masih sebagai tahanan dan belum menjadi narapidana. Penelantaran pelaksanaan eksekusi ini akan berakibat fatal bilamana dikaitkan dengan *correction administration*. Terpidana yang setelah memperbandingkan dengan pelaksanaan eksekusi perkara lain kemudian merasa menjadi korban *the judicial caprice* akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan.²

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah eksistensi Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji dan menganalisis asas-asas hukum yang dianut dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data yang diolah berupa data sekunder, analisis data dilakukan secara kualitatif.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan yang dilakukan oleh hakim merupakan lembaga baru dalam hukum acara pidana di Indonesia. Semula hal ini dicantumkan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 33 Ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. Lembaga hakim pengawas dan

¹ Hamzah, 1985. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Arikha Media Cipta, hlm. 293.

² Muladi dan Nawawi Arief. 1992 *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 54.

pengamat (Kimwasmat) tersebut mirip dengan apa yang dikenal di Perancis sebagai *juge d'application des peines* (JAP). Di Perancis JAP tersebut hanyalah salah satu dari sejumlah hakim yang ditugasi melakukan pengawasan seperti:

- a. *Juge d'instruction* (di tingkat permulaan pemeriksaan)
- b. *Juge des enfants* (untuk anak-anak) dan
- c. *Juge des tutelles* (untuk masalah *voogdij*).

Di beberapa negara seperti Nigeria dan Hungaria, jaksa adalah pengawas atas pelaksanaan putusan hakim. Di Polandia, jaksa bersama-sama dengan hakim bertugas mengawasi legalitas penahanan dan eksekusi putusan pengadilan, sedangkan di Australia, Mesir, Kenya, Malaysia, Mali dan Rumania, hakimlah yang melakukan tugas tersebut juga di Indonesia.³

Berdasarkan ketentuan Bab XX KUHAP tentang Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Pasal 277 sampai dengan Pasal 283) mengatur butir-butir sebagai berikut:

- a. Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan (Pasal 277 Ayat 1);
- b. Hakim mana disebut "hakim pengawas dan pengamat" ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun (Pasal 277 Ayat 2);
- c. Jaksa harus mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan kepada pengadilan yang memutu perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatat dalam register pengawasan dan pengamatan (Pasal 278);
- d. Register tersebut wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani setiap hari kerja oleh panitera dan oleh kimwasmat untuk diketahui (Pasal 279);
- e. Tujuan pengawasan adalah guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya (Pasal 280 Ayat 1);
- f. Tujuan pengamatan adalah untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat

bagi pemidanaan yang diperoleh dari perilaku narapidana, atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya (Pasal 280 Ayat 2);

- g. Pengamatan tersebut tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya (Pasal 280 Ayat 3);
- h. Pengawasan dan pengamatan berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat (Pasal 280 Ayat 4);
- i. Atas permintaan Kimwasmat, kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan Kimwasmat (Pasal 281);
- j. Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, Kimwasmat dapat membicarakan dengan kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu (Pasal 282);
- k. Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh Kimwasmat kepada ketua pengadilan secara berkala (Pasal 283).

Keberadaan hakim pada tahap post adjudikasi dipandang penting dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu sebagaimana yang dianut di Indonesia, mengingat proses peradilan pidana merupakan suatu rangkaian kesatuan yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang maju secara teratur mulai dari penyidikan, penuntutan, diadili oleh pengadilan, akhirnya dibina oleh lembaga koreksional. Berdasarkan *desain prosedur* sistem peradilan pidana yang ditata melalui KUHAP, pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Keempat lembaga penyelenggara peradilan pidana tersebut walaupun mempunyai tujuannya sendiri yang merupakan landasan dan pedoman kerja bagi mereka yang bekerja dalam sub-sistem yang bersangkutan, namun harus mempunyai tanggungjawab dan tujuan yang sama untuk mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana terdiri dari jangka pendek adalah resosialisasi terpidana, jangka menengah adalah pencegahan kejahatan dan jangka panjang adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial.⁴

³ Muladi, 1990, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Mata Pelajaran Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 3.

⁴ Seno Adji, 1989, Seno Adji, Oemar, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, Jakarta: Erlanga, hlm. 129.

Penyelenggaraan peradilan pidana yang melibatkan empat lembaga penegak hukum berdasarkan KUHAP tersebut menuntut adanya keterpaduan cara kerja masing-masing lembaga penegak hukum untuk mencapai tujuan bersama. Keterpaduan cara kerja dari keempat lembaga penegak hukum tersebut harus dilakukan dengan cara koordinasi. Agar kegiatan koordinasi tersebut dapat berjalan secara efektif dibutuhkan adanya koordinator. Mengingat berdasarkan sistem peradilan Indonesia menempatkan hakim sebagai satu-satunya aparat penegak hukum yang berwenang memutus/ menyatakan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana bersalah dan harus diberi sanksi, maka sepatutnyalah hakim bertindak sebagai koordinator penyelenggaraan peradilan pidana berdasarkan KUHAP. Perwujudan kedudukan hakim sebagai koordinator tersebut dapat diketahui dengan adanya ketentuan-ketentuan dalam KUHAP yang menempatkan hakim sebagai lembaga yang berperan mengambil keputusan akhir jika terjadi perselisihan dan evaluasi kinerja penegak hukum dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Perselisihan dan evaluasi kinerja aparat penegak hukum pada tahap pra-adjudikasi makaq peran hakim untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui lembaga hukum Pra-peradilan. Sedangkan peran hakim melakukan evaluasi kinerja aparat penegak hukum pada tahap post-adjudikasi yaitu melalui lembaga hukum Hakim Pengawas dan Pengamat.

Adanya wewenang ketua pengadilan negeri sebagai pengawas dalam pelaksanaan putusan pengadilan melalui Kimwasmat terutama dimaksudkan agar terpidana yang telah terbukti bersalah benar-benar menjalani pidananya dengan sebaik-baiknya sehingga tujuan pembedaan dapat tercapai. Putusan yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan mengurangi nilai segenap upaya penegakan hukum dan keadilan. Ruang lingkup pengawasan dalam rangka evaluasi kinerja pelaksanaan putusan pengadilan oleh lembaga eksekutor dan lembaga koreksional tersebut tidak hanya terbatas pada pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan oleh pihak kejaksaan, melainkan juga pengawasan terhadap cara bagaimana lembaga koreksional dalam hal ini petugas lembaga pemasyarakatan melaksanakan eksekusi pidana penjara yang saat ini diselenggarakan berdasarkan sistem pe-masyarakatan. Hasil

akhir dari kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Kimwasmat yaitu dapat terwujudnya pelaksanaan hak-hak narapidana selama yang bersangkutan menjalankan vonis hakim. Sedangkan titik berat pengamatan adalah untuk memperoleh data dan informasi tentang:

- a. Apakah dalam melaksanakan putusan pengadilan tetap terpelihara sendi-sendi peri kemanusiaan dan peri keadilan khususnya dari pejabat penuntut umum dan lembaga pemasyarakatan setempat;
- b. Apakah jenis dan berat pidana yang telah dijatuhkan sudah tepat sebagai sarana edukasi dan rehabilitasi, baik fisik maupun spiritual guna mengembalikan narapidana yang bersangkutan ke tengah-tengah khalayak ramai sebagai warga masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab.

Adanya kewenangan di atas mengingat pengadilan merupakan benteng terakhir untuk mewujudkan keadilan, disamping adanya karakteristik sistem peradilan pidana Indonesia yang *berkemanusiaan* yaitu mencerminkan nilai-nilai:⁵

- a. mengutamakan pencegahan;
- b. bersifat *Tat-Tater Strafrecht* (berorientasi baik pada perbuatan maupun orangnya);
- c. harmoni dan kesejahteraan sosial sebagai tujuan akhir;
- d. berorientasi ke masa depan;
- e. penggunaan ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan sosial maupun ilmu pengetahuan alam

Dalam menjalankan tugasnya sampai awal tahun 1984 belum ada petunjuk dari Mahkamah Agung bagaimana lembaga Kimwasmat itu harus dilaksanakan. Barulah pada tanggal 28 Februari 1984 Adi Andoyo Soetjipto yang waktu itu selaku Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang Hukum Pidana Umum menyampaikan makalahnya yang berjudul *Kedudukan dan Peran Hakim Pengawas dan Pengamat Menurut KUHAP* pada Penataran Hakim yang diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia Tahun Anggaran 1983/1984 di Jakarta. Makalah tersebut berisi

⁵ Muladi, 1995. *Polisi dan Hak Asasi Manusia*. Makalah Pada Seminar Nasional Polisi Indonesia I di Undip Semarang. Hlm. 146.

mengenai uraian tentang tujuan pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan dan perincian pelaksanaan tugas Kimwasmat. Naskah ceramah ini kemudian diambil alih oleh Mahkamah Agung dan dijadikan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 1984 tanggal 5 Maret 1984.

Menurut Adi Andoyo Soetjipto⁶ bahwa tujuan pengawasan dan pengamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUHAP adalah: 1) untuk memperoleh kepastian bahwa putusan Pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya; 2) untuk bahan penelitian demi ketepatan yang bermanfaat bagi pemidanaan. Tujuan yang pertama adalah merupakan pengawasan horizontal terhadap Jaksa dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan tujuan yang kedua adalah merupakan pengamatan terhadap hasil kerja hakim sendiri yang merupakan pemidanaan. Jadi pengawasan ditujukan pada kinerja aparat penegak hukum *di luar hakim*, sedangkan pengamatan ditujukan pada hasil kinerja hakim sebagai bahan penelitian bagi pemidanaan yang akan datang. Sehingga dalam mengawasi itu hakim menitikberatkan pengawasannya antara lain pada apakah putusan perampasan kemerdekaan itu sudah dilaksanakan sesuai asas-asas perikmanusiaan, apakah cara pembinaan terhadap narapidana tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan, yaitu mengembalikan terpidana menjadi anggota masyarakat yang baik yang patuh pada hukum. Sedangkan dalam mengamati, hakim menitikberatkan pengamatannya pada apakah penjatuan pidana dalam perkara tertentu sudah sesuai dengan tujuan pemberian pidana (misalnya) 2 tahun bagi pemerkosa sudah tepat. Untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik agar "tujuan" dari pada pengawasan dan pengamatan tersebut dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan, maka seorang Hakim Pengawas dan Pengamat sebelumnya harus dibekali pengetahuan mengenai tujuan pemidanaan itu sendiri. Sebab kalau tidak dikhawatirkan bahwa hakim itu akan "tidak punya pedoman" dalam melakukan pengawasan dan pengamatan tersebut.

Untuk mengoptimalkan kinerja Kimwasmat, maka pada tahun 1985 Mahkamah

Agung mengeluarkan lagi petunjuk pelaksanaan yang lebih terperinci yaitu melalui Surat Edaran Nomor 7 Tahun 1985 tanggal 11 Februari 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat yang mengatur hal-hal sebagai berikut.

Tugas Pengawasan

- memeriksa dan menandatangani register di kepaniteraan pengadilan negeri;
- mengadakan *checking on the spot* paling sedikit tiga bulan sekali ke lembaga pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan;
- mengadakan wawancara dengan para petugas lembaga pemasyarakatan mengenai perilaku dan hasil-hasil pembinaan narapidana;
- mengadakan wawancara langsung dengan para narapidana mengenai hal ihwal perlakuan terhadap diri mereka;
- menghubungi Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Ketua Dewan Pembina Pemasyarakatan atau Koordinator Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam rangka saling tukar menukar saran dan pendapat dalam pemecahan suatu masalah serta berkonsultasi mengenai tata cara perlakuan terhadap para narapidana yang bersifat teknis, baik di dalam maupun di luar tembok lembaga pemasyarakatan;

Tugas Pengamatan

- mengumpulkan data tentang perilaku narapidana yang dikategorikan berdasarkan jenis tindak pidananya, dengan berpedoman pada:
 - tipe dari pelaku, misalnya baru pertama kali melakukan tindak pidana atau residivis;
 - keadaan rumah tangganya;
 - perhatian keluarga terhadap dirinya;
 - keadaan lingkungannya;
 - catatan pekerjaannya;
 - catatan kepribadiannya (*tenaga, ego-sentris, dan sebagainya*);

⁶ Waskito Joko S. 2005. *Peran Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Pencapaian Tujuan Pemidanaan*. Tesis Program Pascasarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 76.

- 7) jumlah teman dekatnya;
 - 8) keadaan psikisnya dan lain-lain.
- b. mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, apakah lamanya mencukupi sehingga pada waktu selesai menjalani pidana dapat menjadi warga masyarakat yang baik dan taat pada hukum. Hasilnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri paling sedikit tiga bulan sekali.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kimwasmat haruslah bersikap arif dan bijaksana, karena banyak faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan yang kadang-kadang bisa saling bertentangan. Faktor-faktor mana antara lain adalah:⁷

- a. pendekatan terhadap para narapidana harus dilakukan secara individual atau secara personal;
- b. mengawasi subjek yang berada di bawah pembinaan dan bimbingan instansi lain yaitu lembaga pemasyarakatan;
- c. penilaian yang dilakukan bersifat kualitatif dan subjektif;
- d. dalam pencapaian tujuan pemidanaan perlu disadari adanya pembatasan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 5 huruf f Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 bahwa: "kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan", hal ini berarti hak-hak asasi lainnya tidak boleh dihilangkan dan bahkan harus dihormati. Pandangan ini adalah merupakan konsekuensi dari jiwa KUHAP yang sangat menjunjung tinggi hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana.

Tugas mulia yang diemban oleh Kimwasmat tersebut patut didukung sepenuhnya oleh seluruh bangsa Indonesia baik mengenai sarana maupun prasarana penunjang bagi bekerjanya Kimwasmat. Namun berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa salah satu faktor penyebab belum berperannya Kimwasmat dikarenakan tugas pengawasan dan pengamatan tersebut hanya sebatas tugas sampingan dari tugas pokok seorang hakim yaitu untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara, sehingga hakim yang

bersangkutan lebih mengutamakan tugas pokoknya. Selain itu dalam menjalankan tugasnya Kimwasmat tidak didukung sarana transportasi dan pendanaan.

C. PENUTUP

Kesimpulan

Keberadaan lembaga hukum Kimwasmat dalam sistem peradilan pidana Indonesia baru dikenal sejak berlakunya KUHAP. Tugas Kimwasmat yaitu melakukan pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum yang melaksanakan putusan pengadilan dalam hal ini pihak Kejaksaan selaku eksekutor dan aparat Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan pembinaan terhadap narapidana. Tugas Kimwasmat selanjutnya adalah mengamati sejauhmana pidana yang dijatuhkan oleh hakim telah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Peran Kimwasmat sangat penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu sebagaimana yang dianut oleh HUKAP.

Saran

Agar kinerja Kimwasmat dapat optimal, maka seorang hakim yang bertugas sebagai Kimwasmat harus dibebaskan dari tugas mengadili dan dalam melaksanakan tugasnya harus didukung oleh sarana transportasi dan pendanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. 1993. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Arikha Media Cipta.
- Moleong, Lexi J. 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muladi. 1990. *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*. Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Mata Pelajaran Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muladi. 1995. *Polisi dan Hak Asasi Manusia*. Makalah Pada Seminar Nasional Polisi Indonesia I di Undip Semarang.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. Alumn.

⁷ Waskito Joko S. 2005. *Peran Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Pencapaian Tujuan Pemidanaan*. Tesis Program Pascasarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 66.

Seno Adji, Oemar. 1981. *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*. Jakarta: Erlanga.

Waskito Joko S. 2005. *Peran Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Pencapaian Tujuan Pemidanaan*. Tesis Program Pascasarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.